



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640  
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 246/DJU/UND.HM2.1/IX/2025 Jakarta, 23 September 2025  
Sifat : Biasa  
Hal : Undangan Diskusi terkait Perlindungan  
Hak Perempuan dan Anak  
serta Perkembangan Sistem *online Filing/e-Court*

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Ketua Pengadilan Negeri  
di  
Seluruh Indonesia

Berdasarkan surat dari *Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3* (AIPJ3) Nomor 030/AIPJ3/IX/2025 hal Permohonan Dukungan dan Partisipasi Badilum dalam Rangka Kunjungan *The Honorable Justice* ke Mahkamah Agung RI tertanggal 17 September 2025 sebagaimana surat terlampir, dengan ini kami minta kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri untuk mengikuti kegiatan tersebut secara **daring** yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 September 2025  
Waktu : 13.00 s.d 16.00 WIB  
Agenda : Diskusi terkait Perlindungan Hak Perempuan dan Anak serta  
Perkembangan Sistem *Online Filing/e-Court*  
Link zoom : Meeting ID: 979 1709 1995  
Passcode: 070227

Untuk Koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung dari *Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3* (AIPJ3) atas nama Theodora Putri (Hp. 0811-972-580) atau dari Badan Peradilan Umum atas nama Asri Nur Syafitri (Hp. 0813-8127-4986)

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BAMBANG MYANTO**



Nomor : 030/AIPJ3/IX/2025

Hal : Permohonan Dukungan dan Partisipasi Badilum dalam Rangka Kunjungan The Honorable Justice Suzanne Christie ke Mahkamah Agung RI

Kepada Yth.

Bapak H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI

Di Tempat

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa The Honorable Justice Suzanne Christie dari Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA), didampingi oleh Penasihat AIPJ3 Ibu Cate Sumner, Ibu Leisha Lister, dan Bapak Wahyu Widiana, akan melakukan kunjungan resmi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 23–26 September 2025. Dalam kunjungan ini, FCFCOA dan AIPJ3 berencana menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk membahas keberlanjutan kerja sama court-to-court bersama Badan Peradilan Umum, khususnya terkait transparansi data, pembebasan biaya perkara, perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta isu perkawinan anak—sebagai tindak lanjut dari inisiatif yang telah dibahas dalam program AIPJ2.

Bersama surat ini, kami lampirkan Kerangka Acuan Kegiatan yang memberikan gambaran mengenai tujuan, ruang lingkup, serta hasil yang diharapkan dari kunjungan Justice Christie. Kami sangat berharap Bapak berkenan untuk menerima delegasi FCFCOA dan mengadakan Webinar bersama para pimpinan Badilum serta para Ketua Pengadilan Negeri, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 September 2025

Waktu : 13.00–16.00 WIB

Tempat : Kantor Direktorat Jenderal Peradilan Umum, Cempaka Putih, Jakarta

Agenda : Diskusi kabar terbaru terkait perlindungan hak perempuan dan anak, dengan fokus pada data 2024–2025 mengenai perkara dispensasi kawin, inisiatif akses terhadap keadilan (sidang keliling, posbakum, pembebasan biaya perkara), serta perkembangan sistem online filing dan online hearing.

Kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kesediaan Bapak serta Mahkamah Agung RI untuk menerima dan memfasilitasi kunjungan ini. Dukungan dan kerja sama Mahkamah Agung RI dengan FCFCOA sangat penting dalam upaya meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak, memperkuat transparansi data peradilan, serta memperluas akses terhadap keadilan.

Apabila terdapat pertanyaan atau konfirmasi, mohon agar berkenan untuk menghubungi, Theodora Putri (Manajer Strategi Akses terhadap Keadilan AIPJ3) melalui WhatsApp di 0811972580 atau email [theodora.putri@aipj.or.id](mailto:theodora.putri@aipj.or.id). Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,



Craig Ewers

Team Leader AIPJ3



## Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

### Webinar Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

25 September 2025 | Badan Peradilan Umum MA RI, Cempaka Putih

#### **A. Latar Belakang**

Sejak tahun 2004, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) telah menjalin kerja sama yudisial bilateral yang erat, diformalkan melalui Memorandum of Understanding (MoU) dan terakhir diperbarui pada tahun 2024. Kemitraan ini telah mendorong pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, serta kolaborasi pada isu-isu hukum dan peradilan yang krusial, khususnya yang berdampak pada perempuan dan anak.

Perlindungan hak perempuan dan anak merupakan salah satu prioritas utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Umum. Dalam beberapa tahun terakhir telah dilakukan berbagai upaya penting untuk memperluas akses terhadap keadilan, antara lain melalui pelaksanaan sidang keliling, pos bantuan hukum (posbakum), pembebasan biaya perkara, serta inovasi digital berupa e-filing (pendaftaran perkara secara daring) dan e-court (persidangan daring). Pemantauan terhadap perkara dispensasi kawin juga telah menghasilkan data penting yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan respons peradilan yang berbasis bukti.

Kerja sama ini difasilitasi melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice 3 (AIPJ3), sebuah kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang mendukung akses terhadap keadilan, peningkatan layanan peradilan, serta perlindungan hak-hak kelompok rentan. AIPJ3 dibangun berdasarkan keberhasilan AIPJ2, diharapkan dapat terus berperan penting sebagai wadah kerja sama teknis, dialog kebijakan, serta pertukaran pengalaman antara lembaga peradilan Indonesia dan Australia.

#### **B. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan:

1. Perkembangan terkait inisiatif akses keadilan, termasuk sidang keliling, posbakum, dan mekanisme pembebasan biaya perkara.
2. Data perkara dispensasi kawin tahun 2024–2025 di lingkungan Peradilan Umum.
3. Pembaruan inovasi digital, khususnya pendaftaran perkara daring (online filing) dan persidangan daring (online hearing).
4. Memperkuat kerja sama bilateral dan pertukaran pengetahuan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan FCFCOA, dengan dukungan AIPJ3, untuk meningkatkan perlindungan dan hasil yang lebih baik bagi perempuan dan anak.

#### **C. Hasil yang Diharapkan**

1. Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan peradilan terkait perkembangan dan tantangan perlindungan hak perempuan dan anak.
2. Menguatnya komitmen terhadap reformasi akses keadilan di lingkungan Peradilan Umum.



3. Terjadinya pertukaran pengalaman dan praktik baik antara Indonesia dan Australia dalam penanganan perkara keluarga.
4. Menguatnya kerja sama bilateral MA RI dan FCFCOA melalui fasilitasi AIPJ3.

#### **D. Peserta**

Dari Indonesia:

Direktur Jenderal dan Pejabat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum), hakim dan aparaturnya terkait, serta Tim AIPJ 3.

Dari Australia:

1. Yang Mulia Justice Suzanne Christie, Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA)
2. Ibu Cate Sumner, Penasihat AIPJ3
3. Ibu Leisha Lister, Penasihat AIPJ3

#### **E. (Usulan) Agenda**

Hari/Tanggal : Kamis, 25 September 2025

Tempat : Badilum MA, Cempaka Putih

Rincian agenda sebagai berikut.

Waktu (WIB)	Agenda	Narasumber
13.00–13.30	Sambutan Pembukaan	Pimpinan/Perwakilan Ditjen Badilum
13.30–14.00	Sambutan dari FCFCOA	Justice Suzanne Christie FCFCOA
14.00–14.45	Paparan Ditjen Badilum 2024–2025: Perkara Dispensasi Kawin, Perkembangan Inisiatif Akses Keadilan (posbakum, sidang keliling, pembebasan biaya) dan Pendaftaran Perkara dan Persidangan Daring	Ditjen Badilum

Moderator: Bapak Wahyu Widiana

14.45–15.30	Refleksi dari FCFCOA dan AIPJ3	Justice Christie, Cate Sumner, Leisha Lister
15.30–15.45	Penutupan	Pimpinan/Perwakilan Ditjen Badilum

#### **F. Lampiran**

Riwayat Singkat Justice Suzanne Christie :

Justice Suzanne Christie diangkat sebagai hakim pada Federal Circuit and Family Court of Australia pada tahun 2021. Beliau diterima sebagai Barrister pada tahun 2004 dan diangkat menjadi Senior Counsel pada tahun 2018. Justice Christie meraih gelar Bachelor of Arts dan Bachelor of Laws serta memiliki pengalaman luas dalam hukum keluarga dan perkara terkait, baik di Pengadilan Negara Bagian maupun Pengadilan Federal, termasuk perkara adopsi dan advokasi tingkat banding. Beliau merupakan penulis Lexis Nexis Annotated Family Law Legislation serta penulis bab Financial Agreements dalam Halsbury's Laws of Australia. Justice Christie juga aktif memberikan kuliah, menjadi pembicara dalam berbagai konferensi, serta berkontribusi dalam jurnal hukum.



### **G. Profil AIPJ3**

Australia Indonesia Partnership for Justice 3 (AIPJ3) adalah program lima tahun dengan nilai hingga A\$63 juta. Program ini bertujuan untuk memperkuat lembaga peradilan dan keamanan, menegakkan supremasi hukum, serta mendorong stabilitas dan kemakmuran di Indonesia dan kawasan – yang merupakan kepentingan bersama kedua negara.

Australia dan Indonesia adalah mitra jangka panjang di sektor peradilan dan keamanan melalui kerja sama bilateral selama puluhan tahun. AIPJ3 dibangun berdasarkan keberhasilan AIPJ2, yang mendukung pengembangan terhadap 69 undang-undang, kebijakan, strategi, dan rencana aksi, termasuk yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual, ekstremisme kekerasan, dan korupsi. Program ini akan terus membina hubungan lintas pemerintah, organisasi masyarakat, universitas, dan sektor swasta.

